

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERANAN TIM SUKSES
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(Studi Pada Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

ICE SYINTIA DEWI

NPM : 1521020277

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERANAN TIM SUKSES
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019**

(Studi Pada Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

ICE SYINTIA DEWI

NPM : 1521020277

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M.Sos.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Pemilu legislatif yang telah diselenggarakan pada bulan april tahun 2019 ini merupakan barometer bagi keberhasilan partai dalam kontestasi politik untuk meraih simpati publik. Keberhasilan partai untuk mendulang suara membutuhkan suatu strategi kongkret untuk mengakomodir pemilih yang digerakan melalui kader partai maupun simpatisan. Sementara itu, banyak diketahui partai-partai yang telah menggunakan tim sukses (marketing politik) untuk memenangkan kandidat-kandidat mereka. Tim sukses adalah sebuah cabang taktik politik yang tumbuh dan berkembang ditengah canggihnya peranan teknologi informasi dan telekomunikasi (media) yang banyak dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat luas. Sehingga tidak aneh bila media merupakan saluran utama dalam tim sukses (marketing politik) yang biasa digunakan oleh partai politik untuk mensosialisasikan partai dan kandidat tertentu. Akhir-akhir ini tim sukses (marketing politik) sudah banyak diterapkan dalam dunia politik, institusi politik pun membutuhkan pendekatan alternatif untuk membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat luas. Tim sukses sangat mempengaruhi elektabilitas dari caleg yang menambah simpatik masyarakat sehingga tertarik untuk memilih caleg tersebut.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni Bagaimana peranan tim sukses dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat? serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang peranan tim sukses dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan tim sukses dalam pemilu 2019 khususnya di Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang peranan tim sukses dalam pemilu 2019 di Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat kepada masyarakat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu terjun langsung kelapangan, mencatat, menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut serta melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Upaya-upaya yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing caleg sangat mempengaruhi elektabilitas caleg kandidat Dapil 4 Kabupaten Pesisir Barat yang diusungnya. Tanpa adanya tim sukses dalam pelaksanaan kampanye maka kegiatan kampanye dari kandidat caleg tidak akan terlaksana. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam terkait kegiatan kampanye yang dilakukan tim sukses diperbolehkan selama tidak melanggar nilai-nilai syari'at dan tidak melakukan kecurangan dalam kampanye. Berdasarkan data penelitian, elektabilitas caleg Dapil 4 Kabupaten Pesisir Barat sangat dipengaruhi oleh tim sukses yakni dalam kampanye yang dilakukan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Tim
Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi
Pada Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : Ice Syintia Dewi

NPM : 1521020277

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Susiadi A.S., M.Sos.I

NIP. 195808171993031002

Drs. H. Zikri, M.Sos.

NIP. 196808271994031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Tim
Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi
Pada Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : Ice Syintia Dewi

NPM : 1521020277

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Susiadi A.S., M.Sos.I

NIP. 195808171993031002

Drs. H. Zikri, M.Sos.

NIP. 196808271994031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197111061998032005

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisaa 58)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Samsul Rizal ayaku tercinta, berkat doa restu darinyalah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada ayahku yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anakmu tersayang.
2. Ibu tersayang, Tanti Maryati, terimakasih atas nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosan ibu berikan kepada penulis untuk mencapai kesuksesan. Terimakasih telah mengandung, melahirkan, dan merawatku hingga menjadi seperti ini. Karya sederhana ini yang penulis persembahkan tidak seujung kuku pun dapat membalas perjuanganmu tetapi penulis berharap karya ini akan sedikit memberikan rasa bangga dan senyum kebahagiaan di wajah yang sudah mulai menua dan sedikit membayar lelah dan letih atas perjuanganmu.
3. Kakak dan adik-adikku tercinta, Andres Kogar, Salsa Wulandari, Fraka Audista, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Ice Syintia Dewi, lahir pada tanggal 30 Oktober 1997 di Desa Kuripan, Krui. Anak tunggal dari pasangan Bapak Samsul Rizal dan Ibu Tanti Maryati. Beralamat di Pekon Pugung Tampak, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Kuripan Pesisir Utara pada tahun 2003.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Pesisir Utara pada tahun 2009. Selama duduk dibangku SMP penulis aktif menjadi anggota Pramuka dan aktif dalam kegiatan Solo Song. Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan menari dan Olahraga.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMAN 1 Pesisir Tengah pada tahun 2012. Selama penulis menempuh pendidikan penulis menjadi anggota Marching Band, Paskibra, Pramuka dan Paduan Suara.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyasah.

Bandar Lampung, 05 November 2019
Yang Membuat,

Ice Syintia Dewi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERANAN TIM SUKSES DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI PADA DAPIL 04 KABUPATEN PESISIR BARAT”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Drs. H. Zikri, M.Sos. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2015, khusus Siyasah E: Tiara Virginia, Yunnita, S.H, Repi Susanti, S.H, Elisa, Nadiyah, Ice, Mayang, Habib, Billi, Yedi, Khomsy Juniardi, S.H, Zaenuri, Adha, A. Windo Adenensi, S.H, Samsuddin, Qodar, Bambang, Ari, Fauzi yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Sahabat-sahabat tercinta Yola, Dela, Nuril, Oca, Zora, Yuni, Tyas, Nurul, Fitri, Gosa, Anggraini, Rizki Amelia, Ria, Jodi dan Andre yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 05-11-2019

Ice Syintia Dewi
1521020277

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Metodologi Penelitian	8

BAB II KAJIAN TEORI

A.1. Pemilihan Umum	14
a. Pengertian Pemilihan Umum.....	14
b. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum.....	17
c. Dasar Hukum Pemilihan Umum	20
d. Konsep Islam tentang Pemilihan Umum.....	25
2. Tim Sukses	
a. Pengertian Tim Sukses dalam Pemilihan Calon Legislatif.....	33
b. Tujuan dan Fungsi Tim Sukses Terhadap Pemilihan Calon Legislatif	36
c. Dasar Hukum Tim Sukses Terhadap Pemilihan Calon Legislatif	38
d. Konsep Hukum Islam tentang Tim Sukses	41
B. Tinjauan Pustaka	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek.....	48
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pesisir Barat	48
2. Letak Geografis Kabupaten Pesisir Barat.....	51
3. Keadaan Wilayah.....	52
B. Peranan Tim Sukses Dalam Pemilu	54

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peranan Tim Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Dapil 04 di Kabupaten Pesisir Barat.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Tim Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Dapil 04 di Kabupaten Pesisir Barat	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi
Lampiran 2 Blangko Konsultasi
Lampiran 3 Pedoman Wawancara
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5 Dokumen Pendukung (foto)



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Tim Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat)**, adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah “meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari)”¹.
2. Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam”. Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah “sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur’an dan sunnah baik ketentuan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit)”².

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

² Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17

3. Peranan adalah “aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.”³
4. Tim sukses adalah “sekelompok orang yang bertugas untuk memperjuangkan calon yang di usungnya agar berhasil meraih kemenangan dalam suatu pemilihan”.⁴
5. Pemilihan Umum (PEMILU) adalah “proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu”.⁵
6. Legislatif adalah “yang berhak dan berwenang membuat Undang-Undang”.⁶

Dari beberapa penjelasan diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah peranan tim sukses dalam pemilu legislatif tahun 2019 khususnya dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242

⁴Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali pers, 2016) h.58

⁵*Ibid*, h.45

⁶*Ibid*, h.35

1. Alasan Objektif, alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya kasus di dalam pemilu ditahun 2019 ini, masih banyak tim sukses yang berusaha menawarkan jurus atau cara untuk memenangkan kandidat atau partai politik tertentu.
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Perubahan struktur politik di Indonesia setelah jatuhnya rezim Soeharto dianggap sebagai angin segar bagi tumbuhnya demokrasi di negeri ini.⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Setelah pemberlakuan pemilihan umum secara langsung, politik elektoral di Indonesia banyak mengalami perubahan dari segi pelaksanaan, format pemilihan serta rekrutmen kandidat dalam pemilihan calon legislatif. Perubahan sistem ini merupakan implementasi dari amandemen Undang Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk lebih mematangkan demokrasi secara lebih substantif dan bukan bersifat prosedural. Implikasi dari pemilihan langsung ini berdampak pada tren yang berkembang pesat di Indonesia, yakni bermunculannya konsultan politik atau lembaga survey untuk

⁷Anies R. Baswedan, "Indonesian Politics in 2007: The Presidency, Local Elections and the Future of Democracy", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 43, no. 2 (2007): 333.

mengukur tingkat elektabilitas serta popularitas seorang kandidat dan partai politik dalam suatu kontestasi politik.

Di era multipartai seperti sekarang ini, tim sukses (marketing politik) menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Tidak hanya bagi partai-partai baru dan relatif kecil pendukungnya yang memerlukan tim sukses (marketing politik) guna mengontrol citra dan popularitasnya agar dapat menangkup suara yang memadai, tetapi juga partai-partai besar yang telah eksis dan mapan pun tidak bisa meremehkan kehadiran instrumen yang satu ini.⁸

Aktivitas tim sukses (marketing politik) pun sudah merambah ke media massa, baik cetak, online maupun elektronik sebagai saluran utamanya. Akhir-akhir ini partai politik tidak menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, seperti fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi kepentingan, pendidikan politik, hampir semua fungsi ini relatif tidak dijalankan oleh partai, semuanya hanya terjebak dengan pemenuhan kepentingan partai saja, akibatnya legitimasi rakyat berkurang terhadap partai.

Ditambah dengan banyak terjeratnya elit-elit partai politik dalam kasus hukum yang mengakibatkan apatisme publik terhadap partai politik dan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap citra partai. Sehingga berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik berkurang kepada partai, maka partisipasi politik juga akan berkurang, outputnya banyak masyarakat ketika pemilu yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk tidak memilih atau golput,

⁸Maulana Rifai, *Marketing Politik Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Karawang*, *Jurnal Politik Indonesia* Vol. 1 No. 1 (Juli 2016), h. 109.

bagi rakyat memilih atau tidak sama saja, kehidupan mereka tidak akan berubah.

Betapa pentingnya menjaga hubungan baik antara partai dengan konstituen yang didalamnya tidak terlepas dari proses tim sukses (marketing politik). Tim sukses (Marketing politik) telah menjadi suatu fenomena, tidak hanya dalam ilmu politik, tetapi juga memunculkan beragam pertanyaan para ahli pemasaran (*marketer*) yang selama ini sudah terbiasa dalam konteks dunia usaha. Tentunya terdapat beberapa asumsi yang mesti dilihat untuk dapat memahami tim sukses (marketing politik), karena konteks dunia politik memang banyak mengandung perbedaan dengan dunia usaha, politik berbeda dengan produk retail, sehingga akan berbeda pula muatannya yang ada diantara keduanya, politik terkait erat dengan pernyataan sebuah nilai.

Pemilu legislatif yang telah diselenggarakan pada bulan april tahun 2019 ini merupakan barometer bagi keberhasilan partai dalam kontestasi politik untuk meraih simpati publik. Keberhasilan partai untuk mendulang suara membutuhkan suatu strategi kongkret untuk mengakomodir pemilih yang digerakan melalui kader partai maupun simpatisan (*volunteer*). Sementara itu, banyak diketahui partai-partai yang telah menggunakan tim sukses (marketing politik) untuk memenangkan kandidat-kandidat mereka.

Maka dari itu, penelitian ini mengulas mengenai strategi tim sukses (marketing politik) partai-partai yang layak mendapat perhatian serius untuk menjelaskan dampaknya terhadap partai politik, kandidat, serta pemilih yang merupakan subjek dalam konteks politik elektoral.

Adapun yang menjadi dasar dan pendorong peneliti untuk meneliti masalah ini karena tim sukses (marketing politik) adalah studi atau kajian yang cukup fenomenal dalam pemilu. Bahwa tim sukses (marketing politik) adalah sebuah cabang yang tumbuh dan berkembang ditengah canggihnya peranan teknologi informasi dan telekomunikasi (media) yang banyak dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat luas. Sehingga tidak aneh bila media merupakan saluran utama dalam tim sukses (marketing politik) yang biasa digunakan oleh partai politik untuk mensosialisasikan partai dan kandidat tertentu. Akhir-akhir ini tim sukses (marketing politik) sudah banyak diterapkan dalam dunia politik, institusi politik pun membutuhkan pendekatan alternatif untuk membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat luas.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa di sebut sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, didalam prakteknya yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. para rakyat itu bertindak atas nama rakyat dan wakil wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan. agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat yaitu melalui pemilihan umum dengan demikian pemilihan umum itu tidak lain cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.⁹

⁹Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), h.414

Dalam sistem ketatanegaraan pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama* pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis. *Kedua* kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat. *Ketiga* perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi pertambahan jumlah penduduk dan rakyat dewasa. *Keempat* pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam pemilu termasuk kedalam sistem musyawarah islam telah mewajibkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu dasar dari dasar-dasar hukum dan politik, namun islam juga tidak membuat satu sistem khusus dan tidak merincikan hukum-hukumnya. Tujuan dari hal itu agar rakyat ikut adil dalam perkara musyawarah, dan rincian partisipasi atau adilnya diserahkan kepada mereka dan perkara perincian itu pun berbeda-beda sesuai perbedaan sosial kemasyarakatan.¹¹

Dari pemaparan di atas penyusun mengangkat masalah ini dengan menghususkan pada tim sukses (marketing politik) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengaruh tim sukses tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan tim sukses dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil
04 Kabupaten Pesisir Barat?

¹⁰*Ibid*, h. 415

¹¹Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 72

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang peranan tim sukses dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan tim sukses dalam pemilu legislatif tahun 2019 khususnya di Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang peranan tim sukses dalam pemilu legislatif tahun 2019 kepada masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan sistem praktik tim sukses, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu “suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada dilapangan”.¹² Penelitian dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian yaitu timsukses.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, terutama untuk melihat keterkaitan hubungan dan mengaitkan keterangan dari data lapangan. Pengelolaan datanya melalui pendekatan deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹³

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para responden, melalui wawancara, yaitu bertanya langsung kepada tim sukses.¹⁴ Dalam hal ini respondennya tim sukses partai politik.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹²Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58

¹³Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 14

¹⁴Suharsimi Arikunto,, *Dasar-dasar*, h.129.

Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.¹⁵ Populasi pada penelitian ini adalah beberapa orang atau tim sukses dari partai-partai politik tersebut.

b. Sampel

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.

Adapun tehnik pengambilan sampel adalah *random sampling* atau sampel acak diberi nama demikian karena didalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini penulis meneliti salah satu partai yang menjadi peserta dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat yaitu partai Nasdem. Dapil 04

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 173.

¹⁶*Ibid.*, h. 174

Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 4 kecamatan yaitu Karya Penggawa, Pulau Pisang, Pesisir Utara, dan Lemong.

Tim sukses adalah sebuah grup atau sebuah tim pemenangan dari calon legislatif yang bertanggung jawab atas menang atau kalahnya seorang calon legislatif. Alasan penulis memilih tim tersebut karena tim itu yang erat kaitannya dengan penelitian penulis. Untuk mendapatkan data dari sampel yang telah penulis pilih adalah dengan cara mendatangi langsung tim sukses, Caleg serta warga yang peneliti tuju dan meminta kesediaan responden untuk diwawancara. Yang bersedia untuk menjadi objek penelitian ini ada 20 orang sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang. Yang terdiri dari 4 orang calon legislatif dari partai Nasdem yaitu 2 calon legislatif terpilih dalam Pemilu dan 2 orang calon legislatif yang tidak terpilih, 6 orang anggota tim sukses yang terdiri dari 3 anggota tim sukses dari calon legislatif yang menang dan 3 orang anggota tim sukses dari calon legislatif yang kalah dalam Pemilu, serta 10 orang warga Dapil 04 Kabupaten Pesisir Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.¹⁷ Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan

¹⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50

melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada tim sukses, calon legislatif dan warga setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁸ Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu membenaran apakah semua data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu pemberian data pada tanda yang diperoleh baik berupa penggunaan data ataupun penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi secara analisis data.

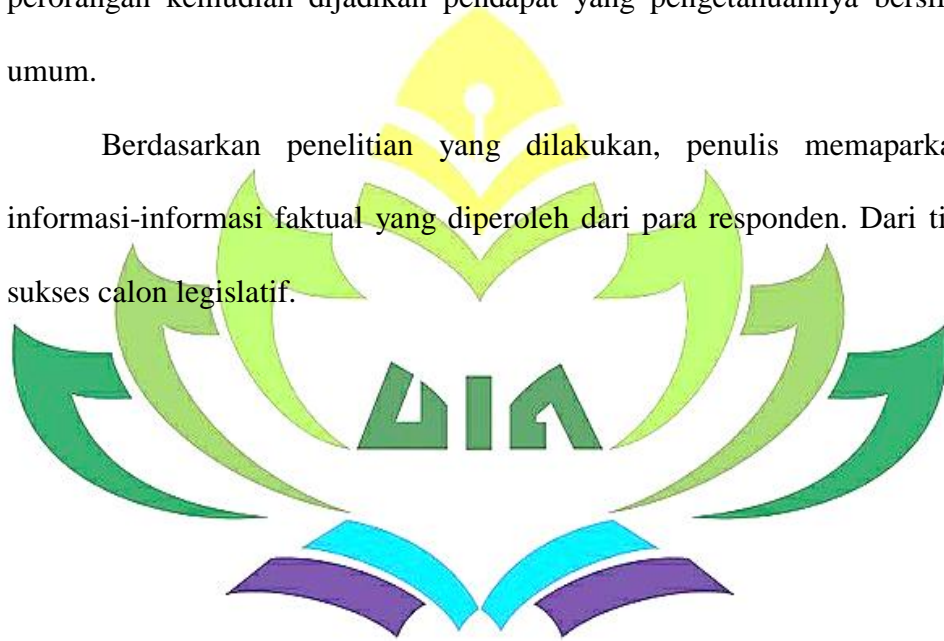
6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk

¹⁸*Ibid.*, h. 274

menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di interpresentasikan temuannya kepada orang lain.¹⁹ Sedangkan metode yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰ Cara berfikir induktif yaitu merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.²¹ Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berpangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari para responden. Dari tim sukses calon legislatif.



¹⁹*Ibid.*, h. 277.

²⁰Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2001), h. 49

²¹*Ibid.*, h. 48

BAB II

KAJIAN TEORI

A.1. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.²²

Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga

²²C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 1986), h. 47

terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.²³

Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan. Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Haris merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.²⁴ Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan

²³Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 95

²⁴ Haris, *Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada*, 2006, h. 10

Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

“Sarana pelaksanaan Kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Huntington menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite.²⁵ Menurut Karim pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.²⁶

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

²⁵ Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004)* (Bandung: IDEA Publishing, 2007), h. 3

²⁶ Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 11

b. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:²⁷

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:²⁸

²⁷ Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP2I, 2003), h. 19

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 80

1) Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Menurut Ginsberg fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara.

Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (Consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.²⁹

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, lima 2004, h. 68

2) Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.³⁰

3) Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit

Penguasa. Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

4) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan

³⁰Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta), h. 96

pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.³¹

c. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan-aturan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara Pemilu 2019 bisa langsung dilihat di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, khususnya pada pasal 280 ayat 1 yang memuat 5 poin penting yaitu:³²

- 1) Pada pasal 280 ayat 1, menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilu yang lain.
- 3) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Peserta Pemilu yang lain.

4) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

5) Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran money politic. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih.

Ketentuan mengenai pemilu diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU yang selanjutnya disebut PKPU, adalah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu.

PKPU itu sendiri merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PKPU diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU. Sampai sekarang sudah ada beberapa PKPU yang telah diundangkan, diantaranya sebagai berikut:³³

- a. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- d. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- f. PKPU Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

³³ Ratna Herawati, *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, h. 835-836

- g. PKPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- h. PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- i. PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- j. PKPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- k. PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- l. PKPU Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- m. PKPU Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- n. PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- o. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- p. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- q. PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.³⁴

KPU mengeluarkan satu peraturan yang disebut PKPU. PKPU sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. PKPU diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga memiliki konsekuensi atau akibat bagi setiap masyarakat atau institusi yang terkait dengan PKPU.

d. Konsep Islam tentang Pemilihan Umum

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah an-nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

³⁴ Ibid.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*³⁵

Yang dimaksud amanat dalam ayat diatas adalah kekuasaan dan jabatan dalam sebuah negara. Wewenang inilah yang Allah jadikan sebagai hak bagi kepala negara, kemudian kepala negara tersebut memilih orang yang memiliki kemampuan dan amanat untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, khulafaur rosyidin, dan para ulil amri kaum muslimin sesudahnya. Mereka semua memilih orang yang layak untuk menduduki dan menjalankan jabatan seperti yang diharapkan.

Allah swt juga berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³⁶

Ayat diatas menerangkan bahwa orang yang berilmu dan beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah swt. Seseorang yang menjabat sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat maka diharuskan memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup serta memiliki iman yang kuat sehigga ia dapat

³⁵ Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 87.

³⁶ *Ibid*, h.543

menjalankan amanat yang diberikan, tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama maupun merugikan masyarakat. Jika orang yang menjabat sebagai pemimpin atau wakil rakyat tidak memiliki iman yang kuat serta ilmu yang cukup maka hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi rakyatnya karena kurangnya pengetahuan.

Misalnya Baiat *al-Nuqabâ'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.³⁷ Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah Saw. dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi Saw. agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. Begitu

³⁷ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 304-305.

juga periode sesudah Nabi Saw., yaitu pada masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. Pemilihan *al-Khulafâ' al- Râsyidûn* berbeda dengan metode pemilu yang dikenal sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa *al- Khulafâ' al-Râsyidûn* dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah.

Pada saat pemilihan Abû Bakr yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abû Bakr, yaitu 'Umar ibn al-Khaththâb, Abû Ubaydah ibn Jarâh, Basyîr ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Sâlim, seorang budak Abû Khudzayfah yang telah dimerdekakan.³⁸

Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan 'Umar ibn al-Khaththâb yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abû Bakr. Meskipun demikian, 'Umar ibn al-Khaththâb menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika 'Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barangsiapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah,

³⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 23.

baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.³⁹

Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin). Riwayat selanjutnya adalah perbuatan ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang laik menjadi seorang khalifah setelah ‘Umar ibn al-Khaththâb wafat. Diwirayatkan bahwa ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hinggamantap pilihan jatuh pada ‘Ustmân ibn ‘Affân. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada Utsmân.⁴⁰

Riwayat ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan ‘Alî ibn Abî Thâlib, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentangnya. Pada saat ‘Alî ibn Abî Thâlib terpilih, ‘Alî ibn Abî Thâlib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari *ahl al-hall wa al-‘aqdi*. ‘Alî ibn Abî Thâlib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.⁴¹ Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat

³⁹ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, h. 306.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Abû Ja’far al-Thabarî, *Târikh al-Thabari* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), h. 75.

dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah).⁴² Adapun hadits nabi tentang larangan meminta jabatan yakni:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ الْآخِرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ:

إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ،⁴³

Dari Abu Musa berkata: Saya masuk menemui Nabi saw, salah seorang dari keduanya lalu berkata: Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allah Azza Wa Jalla kepadamu. Dan seorang lagi mengucapkan perkataan serupa, maka beliau bersabda: Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya.

Terdapat fiqh dari hadits diatas yaitu bahwa orang yang tamak kekuasaan dan meminta jabatan tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Berdasarkan hadits tersebut seseorang dilarang dan tidak diperbolehkan untuk meminta kekuasaan serta jabatan untuk dirinya sendiri karena hal tersebut menunjukan bahwa adanya keinginan untuk berkuasa berdasarkan ketamakan dan sifat rakus.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا

⁴² Ibid.

⁴³ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al Fikr), no. 3402

حَلَفَتْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

Dari Abdurrahman ibn Samurah berkata: Nabi saw bersabda: Wahai Abdurrahman ibn Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.⁴⁴

Hadits diatas menjelaskan alasan Nabi saw. melarang untuk meminta suatu jabatan. Jika larangan tersebut tidak dilanggar, maka akan menghasilkan kemaslahatan yang sangat besar baik bagi yang memimpin yaitu pejabat itu sendiri maupun rakyat. Karena dia akan selalu mendapat pertolongan Allah swt. Bentuk pertolongan tersebut yaitu beban yang berat menjadi terasa ringan, hal yang sulit menjadi mudah, kesempitan akan menjadi lapang, teguran dan koreksi dari kesalahan yang dia lakukan sehingga tetap berada di jalan yang benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, baik sebagai pemimpin tertinggi, wakil, sebagai menteri, gubernur, anggota dewan, dll.

Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat digambarkan yaitu:

- (1) Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *al-Khulafâ' al- Râsyidin*, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.

⁴⁴*Ibid*, no. 3401

(2)Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.⁴⁵

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah:

- 1) Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi*, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abû Bakr atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat 'Alî ibn Abî Thâlib.
- 2) Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari *ahl al-hall wa al-'aqdi* terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan

⁴⁵Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, h. 308-309

tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan *ahl al-hall wa al-'aqdi* dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.

- 3) Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi* atau ikut serta (bersama *ahl al-hall wa al-'aqdi*) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.⁴⁶

2. Tim Sukses

a. Pengertian Tim Sukses dalam Pemilihan Calon Legislatif

Tim sukses adalah “sekelompok orang yang bertugas untuk memperjuangkan calon yang di usungnya agar berhasil meraih kemenangan dalam suatu pemilihan”⁴⁷ Tim sukses direkrut dari tenaga-tenaga potensial sesuai tugas dan fungsinya. Sebuah kegiatan pemasaran politik sedapat mungkin diawali dengan kegiatan pembentukan tim kerja yang disebut “tim sukses”. Sebuah tim suksesbiasanya terdiri dari :

⁴⁶*Ibid*, h. 309-310

⁴⁷Ridwan, *Hukum Administrasi*, h.58

1) Penasihat

Penasihat berfungsi memberi masukan dalam hal strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh organisasi atau kandidat dalam mencapaitujuan, seperti memenangkan pemilu dan merangkul pihak-pihak yang menentukan dalam pemberian suara. Para penasihat ditunjuk pada umumnya punya kematangan dan pengalaman sebagai politisi, dan mengikuti perkembangan dengan melihat dimensi-dimensi strategi yang tidak dilihat oleh orang lain.

2) Tim Ahli

Tim ahli ialah kelompok ahli yang diangkat menurut bidangnya. Tugas tim ahli adalah menyusun program yang akan dibawakan oleh kandidat dan memb~~ack-up~~ kandidat jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bidang keahliannya.

3) Tim Riset

Tim riset ialah kelompok para peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan organisasi, partai atau kandidat. Misalnya pendapat masyarakat tentang kapabilitas kandidat.

4) Tim Kampanye

Tim kampanye ialah mereka yang merencanakan dan menggerakkan kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan organisasi atau partai. Untuk menggerakan kampanye seharusnya ditunjuk seorang manajer kampanye yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan strategi komunikasi, atau yang memiliki pengetahuan

dalam bidang politik, tetapi memiliki pengalaman dan hubungan yang baik dengan sosial.

5) Tim Penggalang Massa

Tim penggalang massa adalah orang-orang yang direkrut untuk menggalang massa, baik untuk kepentingan pengumpulan suara maupun *show force* untuk menunjukkan kekuatan kandidat kepada masyarakat atau calon pemilih. Penggalangan massa biasanya dilakukan untuk kampanye publik di lapangan terbuka, pawai, atau konser musik. Penggalangan massa juga dilakukan untuk mengingatkan para pemilih untuk datang ramai-ramai ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.

6) Tim Pengamat

Kelompok ini dibentuk untuk mengamati dan mengawasi tindakan lawan politik yang membahayakan citra kandidat. Tim pengamat menyampaikan informasi ke pimpinan kandidat atau organisasi untuk segera diambil tindakan dalam mengatasi hal tersebut.

7) Tim Pengumpul Suara (*Vote Getter*)

Mereka terdiri dari orang-orang yang direkrut karena pengaruh yang besar dalam masyarakat. Mereka biasanya memiliki pengaruh dan kedudukan sosial.⁴⁸

Calon Legislatif akan mencapai tujuan kemenangan jika tim suksesnya dapat mengkoordinasikan elemen-elemen tersebut dengan

⁴⁸Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 226-229

profesionalisme. Tim sukses merupakan pemegang tanggung jawab dan penggerak ketika pemilihan umum. Tugas dari tim sukses untuk membantu caleg dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya kemenangan pileg, seperti penyediaan sarana/perlengkapan kampanye, sosialisasi, pertemuan/rapat dan koordinasi antar tim. Sarana atau perlengkapan yang dimaksud misalnya, baliho, spanduk, pamphlet, brosur, leaflet, dan sejenisnya.

b. Tujuan dan Fungsi Tim Sukses

Tujuan dari adanya tim sukses dalam pemilihan calon legislatif adalah untuk memenangkan kandidat calon legislatif yang di usungnya dan bertugas untuk mensosialisasikan visi, misi, serta program yang akan dijalankan oleh calon legislatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim sukses selaku tim kemenangan melakukan kampanye politik berupa kampanye massa yang meliputi kampanye tatap muka dengan melalui media cetak dan elektronik termasuk orasi dan mengerahkan massa. Selain kampanye massa, adapula kampanye antar pribadi yaitu menggunakan tokoh-tokoh yang dekat dengan kandidat dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh lokal dengan setting informal. Dapat pula dengan kampanye organisasi yang dilakukan oleh organisasi yang mengukung kandidat.⁴⁹

Menurut Arnold Steinberg, kampanye politik adalah cara yang digunakan para warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka. Kampanye politik adalah suatu usaha yang

⁴⁹ Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Alfabet, 2012), h. 473

terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan orang yang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi.⁵⁰ Tujuan dari kampanye politik yang dilakukan oleh tim sukses adalah untuk pembentukan *image* politik. Untuk itu partai politik harus menjalin hubungan internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah proses antara anggota-anggota partai dan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas partai pengusung. Sedangkan hubungan eksternal, dilakukan untuk mengkomunikasikan *image* yang akan dibangun kepada pihak luar partai termasuk kepada media massa dan masyarakat.⁵¹

Fungsi dari tim sukses adalah menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat agar tertarik untuk memilih kandidat yang dicalonkan serta merasa yakin untuk memilih kandidat tersebut. Komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses merupakan sebuah strategi dalam pemilihan umum. Kelancaran komunikasi politik akan sangat berpengaruh pada kemantapan kehidupan politik. Komunikasi politik adalah jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.⁵² Fungsi yang secara langsung berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yaitu:⁵³

- 1) Fungsi artikulasi kepentingan, sebagai suatu proses yang mengolah aspirasi masyarakat yang beragam yang akan disaring dan dirumuskan secara teratur dilanjutkan dalam kebijakan.

⁵⁰ *Ibid*, h. 468

⁵¹ *Ibid*, h. 470

⁵² Mas'oed, *Pembandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 130

⁵³ *Ibid*, h. 31

- 2) Fungsi agregasi kepentingan, menggabungkan berbagai kepentingan yang hampir sama untuk disatukan dalam suatu rumusan kebijakan lebih lanjut.
- 3) Fungsi pembuatan kebijakan, merupakan fungsi yang dijalankan oleh legislatif.
- 4) Fungsi penerapan kebijakan, peraturan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif beserta jajaran birokrasinya.
- 5) Fungsi penghakiman kebijakan, yaitu menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut persoalan peraturan, pelanggaran peraturan, dan penegakkan fakta-fakta yang perlu mendapatkan keadilan.

Fungsi komunikasi politik yaitu mewujudkan kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional. Dalam hubungan antara suara dan infrastruktur politik, komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat interpedensi dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara.

c. Dasar Hukum Tim Sukses Terhadap Pemilihan Calon Legislatif

Tim sukses selaku tim kampanye dalam pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017, Kampanye adalah:

“kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu”.⁵⁴

Berdasarkan pasal ini, tim sukses merupakan kelompok orang yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye dengan menawarkan visi dan misi serta program dan citra diri dari peserta pemilu.

Pasal 275 menyatakan, kampanye oleh partai politik, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta calon presiden dan wakil presiden dapat dilakukan melalui: a.Pertemuan terbatas, b.Pertemuan tatap muka, c.Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, d.Pemasangan alat peraga ditempat umum, e.Media sosial, f.Iklan media masa cetak, media masa elektronik, dan internet, g.Rapat umum, h.debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, i.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi:

“Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.⁵⁶

Sanksi dari pelanggaran aturan tersebut tertuang dalam Pasal 521

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000”.⁵⁷

⁵⁴ Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017

⁵⁵ Pasal 275 UU No. 7 Tahun 2017

⁵⁶ Pasal 280 ayat 1 huruf (h) UU No. 7 Tahun 2017

⁵⁷ Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur tentang masa tenang, yang disebutkan masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat (1). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 276 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan kampanye pemilu dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan 3 hari setelah penetapan DCT anggota legislatif dan DPD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai dengan mulainya masa tenang. Kemudian pada Pasal 276 ayat (2) menyebutkan kampanye pemilu dalam bentuk iklan kampanye dan rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Jika ada pihak yang melakukan kampanye pada masa tenang, maka dikategorikan kampanye diluar jadwal dan bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 276 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000”.*⁵⁸

Undang-Undang Pemilu juga mengatur tentang sejumlah hal yang dilarang dilakukan oleh peserta pemilu dan tim suksesnya. Salah satu larangannya adalah melakukan politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan:

⁵⁸ Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017

“Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilu untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;*
- b. Memilih pasangan calon;*
- c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;*
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu;*
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu”⁵⁹*

Sanksi terhadap pelanggaran Pasal ini diatur dalam Pasal 523 ayat

(2) yang menyatakan:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000”⁶⁰

Jika politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka pasangan calon, calon anggota DPR, DPRD, DPD bisa dibatalkan sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kampanye diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Bab VII Kampanye Pemilu.

d. Konsep Hukum Islam tentang Tim Sukses

Di dalam hukum Islam, memang belum ada pengertian tim kampanye/tim sukses dan kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan

⁵⁹ Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017

⁶⁰ Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017

untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.⁶¹ Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi.⁶² Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.⁶³

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-negara yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pelaksanaan kampanye oleh tim sukses/tim kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum.

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye oleh tim sukses adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilih manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.⁶⁴

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye/tim sukses yang di bentuk dari partai

⁶¹Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, h. 128.

⁶²Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 29

⁶³Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta: Palanta, 2007), h. 482.

⁶⁴Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 229.

politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik di sebut dengan istilah al-Hizb al-Siyasi yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.⁶⁵

Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.⁶⁶ Mancalonkan seseorang untuk orang lain dalam hal ini yaitu tim sukses yang membantu kandidat calon untuk meminta rakyat memilih calon tersebut, hal ini diperbolehkan. Di masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut oleh tim sukses kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan

⁶⁵Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9

⁶⁶Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam Syar'iyah al-Intikhabah (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 46

layak untuk menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.⁶⁷

Bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye pemilihan yang dilakukan dengan memuji-muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri.

Dalam hal kampanye, kampanye merupakan media interaksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'al ummah*).⁶⁸ Di dalam pelaksanaan kampanye sendiri, tim sukses sebagai tim kampanye pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanye lah yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat.⁶⁹

Dengan tidak adanya pelaksanaan kampanye sebagai ajang memperkenalkan pasangan calon dan pendidikan politik masyarakat, hal ini

⁶⁷*Ibid*, h. 47

⁶⁸Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*(Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 192

⁶⁹Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep*, h. 230

dikhawatirkan akan membahayakan umat sendiri.⁷⁰ Sebab, khalayak masyarakat tidak mengenal dan mengetahui siapakah yang akan menjadi pemimpin mereka. Dan juga masyarakat tidak memiliki suatu pertimbangan dasar dalam memilih calon pemimpin mereka melalui pemilihan umum.

Sangat diperlukan bagi umat untuk mengetahui dan mengenal calon pemimpin yang akan mereka pilih. Karena pemimpin merupakan wakil rakyat yang akan berkuasa di roda pemerintahan. Oleh karena itu, kampanye yang dilakukan oleh tim sukses merupakan sesuatu yang layak dilakukan sebelum adanya pemilihan umum, guna memperkenalkannya kepada khalayak masyarakat dan demi kemaslahatan masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.⁷¹

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pengaruh tim sukses terhadap elektabilitas calon legislatif yang erat kaitannya dengan strategi kampanye yang dilakukan oleh tim sukses/tim kampanye.

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian adalah:

1. Andri Pratama (2014), dalam skripsinya yang berjudul “Strategi dan Taktik Pemenangan Calon Legislatif Studi Tentang Perempuan Caleg Dari Partai

⁷⁰ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), h. 75-76

⁷¹ *Ibid*, h. 76

Demokrat Dalam Pemilu 2014 Musi Banyumas” memaparkan bahwa faktor yang mempengaruhi strategi pemenangan calon legislatif perempuan dari partai demokrat pada pemilu tahun 2014 adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi strategi, sistem koordinasi dari tingkat DPC ke tingkat anak ranting, popularitas tokoh politik sedangkan faktor eksternalnya yaitu berubahnya perilaku pemilih dan berubahnya sistem perundang-undangan. Dalam penelitiannya, Andri Pratama menjelaskan mengenai strategi dan kendala yang dihadapi oleh calon legislatif perempuan dari partai Demokrat pada pemilu tahun 2014.

2. Ana Fitriana (2014), dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Kampanye Calon Legislatif Pemula DPR RI Dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil JABAR Dalam Memenangkan Pemilihan Umum 2014” menjelaskan strategi yang dilakukan oleh calon legislatif pemula dari partai PPP dalam memenangkan pemilihan. Strategi yang dilakukan meliputi strategi kelompok, strategi komunikasi antar pribadi, dan strategi media luar ruang calon legislatif.
3. Muhammad Riyadh Fadhli (2016), dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Kemenangan Artis Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014” membahas mengenai kemenangan artis Lucky Hakim sebagai anggota legislatif di Dapil Jawa Barat VI Kota Depok dan Bekasi. Lucky Hakim sebagai artis mampu melakukan strategi kampanye yang memenangkannya dalam pemilu legislatif tahun 2014 dengan melakukan promosi melalui media sosial,

bersosialisasi dengan mendatangi ruma-rumah warga (door to door), serta menggunakan media cetak dan banner untuk menarik perhatian masyarakat.

Perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN	METODE PENELITIAN	KETERANGAN
1.	Andri Pratama	Strategi dan Taktik Pemenangan Calon Legislatif Studi tentang Perempuan Caleg dari Partai Demokrat Dalam Pemilu 2014 Musi Banyuasin	Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sekayu	Studi Literatur, Pengumpulan Data, Observasi, Implementasi	Memfokuskan pada calon legislatif perempuan dalam menggunakan taktik kampanye dari partai demokrat dalam pemilu 2014 di Kabupaten Musi Kecamatan Sekayu.
2.	Ana Fitriana	Strategi Kampanye Calon Legislatif Pemula DPR RI Dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil JABAR Dalam Memenangkan Pemilihan Umum 2014	Daerah Pemilihan Jawa Barat	Studi Literatur, Observasi	Skripsi ini memfokuskan pada strategi kampanye yang digunakan oleh calon legislatif pemula dari partai PPP dalam memenangkan Pemilu 2014
3.	Muhammad Riyadh Fadhli	Strategi Kemenangan Artis Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014	Dapil Jawa Barat VI Kota Bekasi dan Depok	Observasi, Pengumpulan Data	Lebih memfokuskan pada faktor pendorong kemenangan artis dalam pemilu legislatif 2014 serta strategi yang ditempuh artis dalam berkampanye

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr.

Abû Ja'far, *Târikh al-Thabari*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.

Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Indonesia, 2001.

Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.

Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 1986.

Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003

Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Medan: Dwipa, 1965

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabet, 2012.

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Palanta, 2007.
Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005

Hadis riwayat al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî, Bâb Rajm al-Hublâ fî al-Zinâ Idzâ Ahshanat*, No. 6781

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Hamidy, Mu'ammal, AM, Imron, Fanany BA., Umar, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.

Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Karim Zaidan, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam Syar'iyyah al-Intikhabah, Bandung: PT. Syaamil Media, 2003.

Mas'oed, *Pembandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

M. Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.

Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I, 2003.

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali pers, 2016

Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004)*, Bandung: IDEA Publishing, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, lima 2004.

Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, Bandung: Tarsito, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2001.

Undang-Undang

Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 275 UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Pasal 280 ayat 1 huruf (h) UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017



Jurnal

Anies R. Baswedan, "Indonesian Politics in 2007: The Presidency, Local Elections and the Future of Democracy", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 43 No. 2, 2007.

Haris, *Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada*, 2006.

Maulana Rifai, Marketing Politik Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Karawang, *Jurnal Politik Indonesia* Vol. 1 No. 1 Juli 2016.

Ratna Herawati, Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 4 No.3, 2018.

Wawancara

Dokumentasi Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 24 Oktober 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pesisir Barat 2019.

Fadlin Abit, Wawancara dengan LO, Krui, 24 Oktober 2019

Reza Sofyan, Wawancara Calon Legislatif Partai Nasdem Dapil 4 Pesisir Barat, Krui, 24 Oktober 2019

Yeti Herlina, Wawancara Calon Legislatif Partai Nasdem Dapil 4 Pesisir Barat, Krui, 24 Oktober 2019

Hendrik Gunawan, Wawancara Calon Legislatif Partai Nasdem Dapil 4 Pesisir Barat, Krui, 24 Oktober 2019

Heri Gunawan, Wawancara dengan Koordinator Tim Sukses Yeti Herlina, Kantor Partai Nasdem, Krui, 24 Oktober 2019

M. Gustami, Wawancara dengan Anggota Tim Sukses Yeti Herlina, Kantor Partai Nasdem, Krui, 24 Oktober 2019

Burhannudin, Wawancara dengan Koordinator Karya Penggawa, Kantor Partai Nasdem, Krui, 24 Oktober 2019

Erik Susanto, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Rina Annisa, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Ardi Sandi, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Bardi, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Luki, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Helyana, Wawancara Calon Legislatif Partai Nasdem Dapil 4 Pesisir Barat, Krui, 24 Oktober 2019

Khairul Sidiq, Wawancara dengan Koordinator Tim Sukses Reza Sofyan, Kantor Partai Nasdem, Krui, 24 Oktober 219

Ariandi, Wawancara dengan Koordinator Karya Penggawa, Kantor Partai Nasdem, Krui, 24 Oktober 2019

Rohman, Wawancara dengan Anggota Tim Sukses Reza Sofyan, Kantor Partai Nasdem, Krui, 24 Oktober 2019

Anggiana, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Desi Nur Indah, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Karmilah, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Guntur Wanda, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

Suseno Kardi, Wawancara dengan Warga, Karya Penggawa, Krui, 24 Oktober 2019

